

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap keberlangsungan UMKM di SMAN 104 Jakarta Timur dan SMAN 46 Jakarta Selatan dalam perspektif ekonomi politik Robert Gilpin, dapat disimpulkan bahwa Program MBG tidak hanya hadir sebagai kebijakan sosial yang berorientasi pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga sebagai kebijakan ekonomi yang memengaruhi hubungan antara negara, pasar, dan pelaku usaha lokal. Dalam perspektif ekonomi politik Robert Gilpin, kebijakan negara selalu berkaitan dengan bagaimana negara menggunakan kewenangannya untuk mengatur pasar, mengalokasikan sumber daya ekonomi, serta menentukan distribusi manfaat ekonomi kepada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi MBG merupakan bentuk intervensi negara yang tidak hanya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial, tetapi juga membentuk struktur pasar dan memengaruhi dinamika ekonomi lokal di sekitar sekolah.

Pertama, **implementasi Program MBG menunjukkan bahwa negara memiliki posisi dominan dalam membentuk hubungan antara negara dan pasar.** Dominasi tersebut tampak melalui peran pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai perumus kebijakan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis, yang mengatur mekanisme penyediaan makanan, pengadaan bahan pangan, hingga distribusi makanan kepada peserta didik. Dalam hal ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk struktur pasar melalui penetapan standar, skema kerja sama, serta persyaratan bagi pemasok dan UMKM yang ingin terlibat. Oleh karena itu, hubungan negara dan pasar dalam implementasi MBG dapat dipahami sebagai hubungan yang intervensif dan tidak seimbang, karena negara memegang kewenangan yang lebih besar dalam menentukan arah, aturan, dan struktur ekonomi yang terbentuk di sekitar pelaksanaan program.

Arzeta Cahya Pramita, 2026

EKONOMI POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) : DAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN UMKM DI SEKITAR SMAN 104 JAKARTA TIMUR DAN SMAN 46 JAKARTA SELATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kedua, **peran negara dalam kebijakan ekonomi melalui Program MBG terlihat sangat menonjol**, baik dalam penetapan tujuan program, alokasi anggaran, pembentukan lembaga pelaksana, maupun pengendalian terhadap peluang ekonomi yang dihasilkan oleh program tersebut. MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan status gizi peserta didik, tetapi juga diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, koperasi, petani, peternak, dan pelaku usaha lain dalam rantai pasok bahan pangan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut belum sepenuhnya bersifat inklusif karena masih dibatasi oleh persyaratan tertentu, seperti legalitas usaha, kapasitas produksi, kualitas produk, serta kemampuan menjaga kesinambungan pasokan. Dengan demikian, negara dalam implementasi MBG tidak hanya berperan sebagai pengatur ekonomi, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan siapa saja yang dapat mengakses peluang ekonomi yang muncul dari kebijakan tersebut.

Ketiga, **distribusi sumber daya ekonomi dalam implementasi MBG belum berlangsung secara merata di antara para aktor yang terlibat**. BGN dan SPPG merupakan aktor yang paling dominan dalam menguasai sumber daya strategis, seperti kewenangan kebijakan, akses informasi, pengadaan bahan pangan, serta penentuan mitra program. Di sisi lain, sekolah lebih berfungsi sebagai fasilitator pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan dan tidak memiliki kewenangan signifikan dalam menentukan UMKM yang dapat terlibat dalam program. Sementara itu, UMKM terutama kantin sekolah dan pedagang di sekitar sekolah tidak secara otomatis memperoleh akses terhadap sumber daya program, meskipun mereka berada di lingkungan yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki posisi dominan dalam menentukan aktor-aktor yang memperoleh akses terhadap peluang ekonomi, sehingga mekanisme pasar dalam implementasi MBG tidak sepenuhnya berjalan secara bebas sebagaimana dipahami dalam perspektif ekonomi politik Robert Gilpin.

Keempat, **distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan dari implementasi MBG juga belum sepenuhnya merata**. Program MBG pada dasarnya memiliki potensi untuk menciptakan manfaat ekonomi baru melalui

Arzeta Cahya Pramita, 2026

EKONOMI POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) : DAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN UMKM DI SEKITAR SMAN 104 JAKARTA TIMUR DAN SMAN 46 JAKARTA SELATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kebutuhan bahan pangan yang bersifat rutin dan stabil, sehingga dapat membuka peluang usaha bagi UMKM yang berhasil masuk ke dalam rantai pasok program. Akan tetapi, manfaat tersebut lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha yang telah memiliki akses terhadap jaringan implementasi MBG, seperti pemasok bahan pangan atau mitra operasional SPPG. Sebaliknya, UMKM yang tidak terlibat secara langsung khususnya kantin sekolah dan pedagang makanan di sekitar sekolah justru mengalami penurunan permintaan terhadap makanan utama karena sebagian kebutuhan konsumsi siswa telah dipenuhi oleh program. Dengan demikian, implementasi MBG menunjukkan bahwa kebijakan negara dapat menciptakan keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu, namun pada saat yang sama juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi kelompok lain yang tidak memperoleh akses terhadap manfaat program tersebut. Dalam perspektif Robert Gilpin, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan negara menghasilkan distribusi manfaat ekonomi yang berbeda antaraktor, sehingga terdapat pihak yang memperoleh manfaat secara langsung, sementara pihak lain menghadapi konsekuensi ekonomi akibat perubahan mekanisme pasar yang dibentuk melalui kebijakan tersebut.

Kelima, **implementasi Program MBG memberikan dampak terhadap keberlangsungan UMKM di lingkungan sekolah**, terutama bagi UMKM yang menjual makanan utama atau makanan berat. Dampak tersebut tercermin dalam penurunan omzet penjualan, berkurangnya jumlah pelanggan, serta menurunnya pendapatan usaha, meskipun tingkat dampaknya berbeda pada masing-masing pelaku usaha. Penurunan paling terasa dialami oleh usaha yang menjual produk yang secara langsung bersaing dengan menu MBG, seperti nasi, lauk, dan makanan utama lainnya. Sementara itu, UMKM yang menjual makanan ringan, camilan, minuman, dan produk pelengkap lainnya masih dapat mempertahankan sebagian konsumennya meskipun pola pembelian siswa mengalami perubahan. Dari sisi tenaga kerja, implementasi MBG belum selalu menyebabkan pengurangan pekerja secara formal, terutama karena sebagian besar UMKM berskala kecil masih dikelola secara mandiri atau dibantu anggota keluarga. Meski demikian, perubahan

Arzeta Cahya Pramita, 2026

EKONOMI POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) : DAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN UMKM DI SEKITAR SMAN 104 JAKARTA TIMUR DAN SMAN 46 JAKARTA SELATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pola penjualan tetap mendorong adanya penyesuaian dalam jumlah produksi, pengelolaan stok, serta pengaturan jam operasional usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa intervensi negara melalui implementasi MBG telah mengubah pola konsumsi siswa dan mekanisme pasar lokal di sekitar sekolah, sehingga berdampak pada keberlangsungan sebagian UMKM.

Keenam, **kemampuan adaptasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberlangsungan UMKM di tengah implementasi Program MBG.** Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UMKM yang mampu bertahan pada umumnya adalah mereka yang melakukan penyesuaian strategi usaha, seperti mengurangi penjualan makanan berat, memperbanyak produk yang tidak secara langsung bersaing dengan menu MBG, menambah variasi minuman dan camilan, serta menyesuaikan jumlah produksi untuk meminimalkan kerugian akibat makanan sisa. Sebaliknya, UMKM yang sangat bergantung pada penjualan makanan utama dan memiliki keterbatasan modal maupun kemampuan diversifikasi cenderung lebih rentan terdampak oleh implementasi program. Oleh sebab itu, keberlangsungan UMKM dalam konteks MBG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam beradaptasi terhadap perubahan pola konsumsi yang ditimbulkan oleh program.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi sosial dalam upaya pemenuhan gizi peserta didik dan dimensi ekonomi yang memengaruhi relasi antara negara, pasar, dan UMKM. Dalam perspektif ekonomi politik Robert Gilpin, implementasi MBG memperlihatkan bahwa negara memiliki peran dominan dalam membentuk struktur pasar, mendistribusikan sumber daya, serta menentukan distribusi manfaat ekonomi. Namun demikian, implementasi kebijakan ini juga menunjukkan bahwa intervensi negara dalam membentuk struktur pasar belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh UMKM di sekitar sekolah.

Arzeta Cahya Pramita, 2026

EKONOMI POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) : DAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN UMKM DI SEKITAR SMAN 104 JAKARTA TIMUR DAN SMAN 46 JAKARTA SELATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran akademik yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

Pertama, kajian mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan UMKM perlu dikembangkan melalui perluasan cakupan lokasi penelitian. Penelitian selanjutnya tidak hanya dapat difokuskan pada dua sekolah, tetapi juga dapat mencakup sekolah-sekolah di wilayah lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda.

Perluasan tersebut penting untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai variasi dampak implementasi MBG dalam konteks daerah yang beragam.

Kedua, penelitian berikutnya dapat memperdalam analisis mengenai dampak ekonomi Program MBG terhadap UMKM dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*). Melalui pendekatan tersebut, perubahan pada aspek omzet, jumlah pelanggan, pendapatan usaha, maupun tenaga kerja dapat diukur secara lebih sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menyajikan deskripsi mengenai pengalaman pelaku UMKM, tetapi juga didukung oleh data empiris yang lebih terukur.

Ketiga, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan subjek atau informan penelitian dengan melibatkan aktor-aktor lain yang memiliki keterkaitan dengan implementasi Program MBG, seperti orang tua siswa, pemasok bahan pangan, koperasi, petani, pelaku usaha lokal lainnya, serta pihak pengelola SPPG. Keterlibatan informan yang lebih beragam diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai relasi antaraktor, distribusi manfaat, dan dinamika implementasi kebijakan di lapangan.

Keempat, penelitian mendatang juga dapat memanfaatkan perspektif teori lain dalam kajian ekonomi politik maupun kebijakan publik, seperti *welfare state*, *state intervention*, *governance*, atau teori implementasi kebijakan. Penggunaan perspektif teoritis yang berbeda akan membuka ruang untuk

Arzeta Cahya Pramita, 2026

**EKONOMI POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) : DAMPAK TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN UMKM DI SEKITAR SMAN 104 JAKARTA TIMUR DAN SMAN 46 JAKARTA SELATAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

membandingkan hasil penelitian ini sekaligus memperkaya pemahaman akademik mengenai posisi negara, pasar, dan pelaku usaha lokal dalam implementasi Program MBG.

Kelima, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam pengembangan kajian ekonomi politik terkait kebijakan pangan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai rujukan untuk mengembangkan studi yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan publik, intervensi negara, dan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi Badan Gizi Nasional (BGN), peneliti menyarankan agar skema pelibatan UMKM lokal dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat secara lebih inklusif dan terstruktur. Pelibatan UMKM tidak cukup hanya dibuka secara umum, tetapi juga perlu disertai dengan mekanisme pendataan, seleksi, pembinaan, dan pendampingan agar UMKM kecil di sekitar sekolah memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok program. Selain itu, BGN juga perlu menyusun kebijakan afirmatif bagi UMKM kecil di sekitar sekolah, misalnya dengan menyediakan porsi kemitraan tertentu bagi UMKM lokal yang telah memenuhi standar dasar keamanan pangan dan kualitas produk. Langkah ini penting agar manfaat ekonomi Program MBG tidak hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha yang telah besar atau memiliki jaringan kuat, tetapi juga dapat dirasakan oleh UMKM yang secara langsung terdampak oleh implementasi program. Di samping itu, BGN perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak ekonomi Program MBG terhadap UMKM di sekitar sekolah, sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga dari dampaknya terhadap ekosistem ekonomi lokal, terutama bagi kantin sekolah dan pedagang kecil yang mengalami penurunan penjualan.

2. Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peneliti menyarankan agar komunikasi dan koordinasi dengan UMKM lokal di sekitar sekolah dibangun secara lebih aktif, khususnya terkait peluang kemitraan, kebutuhan bahan pangan, serta

Arzeta Cahya Pramita, 2026

*EKONOMI POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) : DAMPAK TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN UMKM DI SEKITAR SMAN 104 JAKARTA TIMUR DAN SMAN 46 JAKARTA SELATAN*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra program. Komunikasi yang lebih terbuka akan membantu UMKM memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai peluang keterlibatan mereka dalam Program MBG. Selain itu, SPPG sebaiknya tidak hanya berfokus pada mitra yang telah siap secara penuh, tetapi juga mendorong pembinaan secara bertahap bagi UMKM yang potensial. Dengan demikian, UMKM yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pasokan dalam skala besar tetap dapat dilibatkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. SPPG juga perlu mempertimbangkan penguatan pola kemitraan dengan pemasok lokal yang berada di sekitar sekolah, khususnya untuk komoditas tertentu seperti sayur, buah, makanan ringan sehat, maupun kebutuhan pendukung lainnya, agar manfaat ekonomi program dapat lebih banyak berputar di lingkungan sekitar pelaksanaan MBG.

3. Bagi sekolah, peneliti menyarankan agar pihak sekolah berperan sebagai fasilitator komunikasi antara pelaksana Program MBG dengan UMKM di lingkungan sekolah, khususnya kantin sekolah dan pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Sekolah dapat membantu menyampaikan informasi, memfasilitasi pertemuan, maupun memberikan masukan terkait kondisi UMKM yang terdampak oleh program. Selain itu, sekolah juga perlu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pengelola kantin sekolah agar mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi siswa akibat implementasi Program MBG. Pendampingan tersebut dapat dilakukan dengan mendorong inovasi menu, memperbanyak makanan ringan sehat, minuman, maupun produk pelengkap yang tidak bersaing secara langsung dengan menu MBG. Sekolah juga perlu menjaga keseimbangan antara pelaksanaan MBG dan keberlangsungan usaha kantin sekolah, misalnya dengan membantu mengarahkan jenis makanan yang dijual di kantin agar tetap relevan dengan kebutuhan siswa, namun tidak bertabrakan secara langsung dengan menu utama yang diberikan dalam Program MBG.

4. Bagi UMKM dan pengelola kantin sekolah, peneliti menyarankan agar mereka meningkatkan kemampuan adaptasi usahanya dengan menyesuaikan jenis produk yang dijual, memperbanyak makanan ringan, camilan, minuman, atau menu

Arzeta Cahya Pramita, 2026

EKONOMI POLITIK IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) : DAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN UMKM DI SEKITAR SMAN 104 JAKARTA TIMUR DAN SMAN 46 JAKARTA SELATAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pelengkap yang tetap dibutuhkan siswa meskipun siswa telah menerima makanan dari Program MBG. Selain itu, UMKM juga perlu meningkatkan legalitas dan kualitas usahanya, misalnya dengan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha pangan, sertifikasi halal, serta menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan. Upaya ini penting agar UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat sebagai mitra dalam rantai pasok Program MBG. Di samping itu, UMKM juga perlu mengembangkan strategi diversifikasi usaha agar tidak hanya bergantung pada satu jenis produk atau satu segmen konsumen. Diversifikasi dapat dilakukan melalui penambahan variasi menu, pengembangan produk baru, maupun perluasan target pasar di luar siswa, seperti guru, pegawai sekolah, dan masyarakat sekitar.

5. Bagi pemerintah daerah atau instansi pendukung UMKM, peneliti menyarankan agar pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi legalitas bagi UMKM di sekitar sekolah lebih diperkuat agar mereka memiliki kesiapan untuk terlibat dalam Program MBG. Pendampingan tersebut dapat mencakup pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, keamanan pangan, serta penguatan kapasitas produksi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat membangun skema kolaborasi antara UMKM, sekolah, dan pelaksana Program MBG sehingga tercipta ekosistem yang lebih terintegrasi antara tujuan pemenuhan gizi peserta didik dengan penguatan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga perlu memantau dampak kebijakan MBG terhadap UMKM lokal agar dapat merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan setelah implementasi program.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya menghasilkan dampak sosial, tetapi juga membentuk dinamika ekonomi politik melalui perubahan relasi antara negara dan pasar.